

ABSTRAK

Permasalahan dalam bidang lalu lintas tidak dapat dipisahkan dari kejadian kecelakaan di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja di jalan, yang melibatkan kendaraan bermotor. Tindakan pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri tanpa memberikan pertanggungjawaban dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Guna mengatasi tingginya kasus tindak pidana tabrak lari, peran kepolisian sebagai institusi penegak hukum sangatlah penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dan menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan penegakan hukum terhadap peristiwa tersebut dilakukan secara optimal dan berimbang dengan jumlah kasus yang terjadi, proses penegakan hukum dilaksanakan sesuai prosedur. Dalam penanganan kasus, aparat kepolisian menerapkan ketentuan Pasal 310 dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan bentuk sanksi yang dapat berupa pidana penjara, denda, atau penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice*. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah kendala yang cukup signifikan. Kendala tersebut antara lain tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian, tidak dikenalnya identitas korban maupun pelaku, serta minimnya dukungan alat bukti seperti rekaman CCTV di lokasi kejadian. Hambatan-hambatan ini memperlambat proses identifikasi dan penyelidikan terhadap pelaku, sehingga menuntut aparat penegak hukum untuk bekerja lebih keras dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tabrak Lari, Polresta Jambi

ABSTRACT

Traffic problems cannot be separated from road accidents. Traffic accidents are events that occur unintentionally on the road, involving motor vehicles. The actions of drivers involved in traffic accidents and running away without taking responsibility can be subject to criminal sanctions based on Article 312 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. In order to overcome the high number of hit-and-run cases, the role of the police as a law enforcement institution is very important. The purpose of this study was to determine and analyze law enforcement against perpetrators of hit-and-run crimes in the jurisdiction of the Jambi City Police and to analyze obstacles in law enforcement against perpetrators of hit-and-run crimes in the jurisdiction of the Jambi City Police. The method used in this study is the empirical legal research method. Data collection in this study was carried out by interview. From the results of this study, it can be concluded that law enforcement against the incident was carried out optimally and in balance with the number of cases that occurred, the law enforcement process was carried out according to procedure. In handling the case, the police enforce the provisions of Article 310 and Article 312 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, with sanctions that can be in the form of imprisonment, fines, or settlement through restorative justice mechanisms. In its implementation, there are still a number of significant obstacles. These obstacles include the absence of witnesses who saw the incident directly, the unknown identity of the victim or perpetrator, and the lack of supporting evidence such as CCTV footage at the scene. These obstacles slow down the process of identifying and investigating the perpetrators, thus requiring law enforcement officers to work harder by maximizing existing resources.

Keywords: *Law Enforcement, Hit and Run, Jambi Police*